

MEMPROMOSIKAN DEMOKRASI YANG BERKELANJUTAN DI SEKOLAH-SEKOLAH KAMBOJA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN MORAL

PROMOTING SUSTAINABLE DEMOCRACY IN CAMBODIAN SCHOOLS THROUGH CITIZENSHIP AND MORAL EDUCATION

Dock Chanthoern*, Sukma Prasetya Perdana, Harmanto
Program Magister Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya
Jalan Lidah Wetan Surabaya 60213, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 12 April 2023

Disetujui : 13 Juni 2023

Keywords:

promote, democracy, civic and moral education

Kata Kunci:

promosi, demokrasi, pendidikan kewarganegaraan dan moral

***) Korespondensi:**

E-mail: dock4chanthoern@gmail.com

Abstract: this study proposes the comprehensive implementation of civic and moral education programs and the impact of promoting sustainable democracy. This study uses qualitative research with a phenomenological approach. The subjects in this study focused on educators, high school students, and young people who were strategically selected through purposive sampling. Primary data sources were obtained through interviews, while secondary data sources were literature studies related to curriculum and school policies. The data collection technique uses in-depth interviews with a semi-structured format through open questions. The data obtained was translated and analyzed qualitatively. The results of the study show that comprehensive civic and moral education programs contribute to promoting democratic values and attitudes among youth. Instilling democratic values to increase youth participation and awareness in Cambodia requires steps including teacher training, curriculum changes, interactive learning, open political workings, and involving the community. Teaching better civic and moral education can help in maintaining democracy and the involvement of young people.

Abstrak: kajian ini mengusulkan penerapan komprehensif program pendidikan kewarganegaraan dan moral serta dampak mempromosikan demokrasi yang berkelanjutan. Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Subjek dalam kajian ini difokuskan pada pendidik, peserta didik sekolah menengah atas, serta kaum muda yang dipilih secara strategis melalui pengambilan sampel purposif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder berupa kajian literatur terkait kurikulum serta kebijakan sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan format semi-struktur melalui pertanyaan terbuka. Data yang diperoleh diterjemahkan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa program pendidikan kewarganegaraan dan moral yang komprehensif berkontribusi dalam mempromosikan nilai-nilai dan sikap demokratis di kalangan pemuda. Penanaman nilai-nilai demokrasi untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian kaum muda di Negara Kamboja membutuhkan langkah-langkah meliputi pelatihan guru, perubahan kurikulum, pembelajaran interaktif, cara kerja politik yang terbuka, dan melibatkan masyarakat. Pengajaran pendidikan kewarganegaraan dan moral yang lebih baik dapat membantu dalam mempertahankan demokrasi dan keterlibatan generasi muda.

PENDAHULUAN

Negara Kamboja memiliki latar belakang sejarah yang mencekam ditandai dengan genosida dan ketidakstabilan politik. Sumber dari lemahnya stabilitas politik akibat ketidakpercayaan yang tertanam kuat dalam masyarakat Kamboja. Dampak ketidakstabilan politik menimbulkan permasalahan di Negara Kamboja terutama dalam mempertahankan demokrasi yang berkelanjutan (Heng, 2016). Konsep demokrasi berkelanjutan menekankan pentingnya keterlibatan warga, partisipasi sipil, dan pengembangan nilai-nilai demokratis yang diakui secara global (Tan, 2008). Upaya negara dalam mempertahankan demokrasi yang berkelanjutan membutuhkan sinergitas antara institusi, struktur pemerintahan, dan partisipasi warga negara. Membangun demokrasi berkelanjutan menjadi langkah utama Negara Kamboja untuk memperbaiki keadaan dan iklim yang kondusif dalam sistem politik.

Pengembangan demokrasi yang berkelanjutan salah satunya dapat diterapkan melalui lembaga pendidikan. Sektor pendidikan memainkan peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai dan praktik demokratis (Batubara & Darmawan, 2017). Pendidikan menjadi cara yang bijaksana untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi secara efektif dan dinamis. Sistem pendidikan di Negara Kamboja telah dikritik karena kurangnya penekanan pada warga sipil dan pendidikan moral (Kitz, 2015). Warisan rezim Khmer Merah memberikan dampak yang signifikan pada sistem pendidikan, sehingga menyebabkan penindasan pemikiran kritis dan prinsip-prinsip demokratis (Hughes & Un, 2011). Revitalisasi sistem pendidikan harus dilakukan agar demokrasi dapat tumbuh dan menguat secara berkelanjutan. Demokrasi yang berkelanjutan membutuhkan iklim dan budaya politik yang terus diperkuat melalui pendidikan.

Integrasi pendidikan kewarganegaraan dan moral dalam kurikulum sekolah Kamboja sangat diperlukan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang berpikir kritis dan demokratis (Ruslan, Sanusi, & Safitri, 2021). Komponen utama dalam pengembangan pendidikan moral di lembaga pendidikan menekankan pada tindakan seseorang berdasarkan nilai dan kehidupan nyata (Slocomb, 2014). Peserta didik melalui pendidikan kewarganegaraan

diajarkan tentang hak, kewajiban, dan fungsi pemerintah, sedangkan pendidikan moral yang menanamkan etika dan nilai-nilai. Kombinasi pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral memiliki potensi untuk berkontribusi pada pengembangan warga negara demokratis (Muñoz, 2014). Masyarakat demokratis harus berkomitmen terhadap pendidikan kewarganegaraan dan moral dalam pembentukan menjadi warga negara yang bertanggung jawab.

Inisiatif untuk meningkatkan sistem pendidikan di Negara Kamboja tidak diimbangi dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Hal ini mengakibatkan permasalahan baru dalam menumbuhkan demokrasi yang berkelanjutan melalui lembaga pendidikan. Hambatan sekolah-sekolah Kamboja dalam mendukung demokrasi berkelanjutan yaitu kurangnya guru yang terlatih dengan baik dalam pendidikan kewarganegaraan dan moral (UNDP, n.d). Proses pembelajaran masih menggunakan materi pengajaran berupa tekstual yang harus dihafalkan oleh peserta didik (Eng et al., 2021). Pendidikan kewarganegaraan dan moral harus diperbaiki dengan menggunakan metode inovatif agar dapat mengarah pada sasaran mempertahankan demokrasi yang berkelanjutan. Nilai-nilai demokrasi belum diimplikasikan dengan baik di Negara Kamboja khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan dan moral.

Tantangan dalam mempertahankan demokrasi yang berkelanjutan menarik perhatian pada persyaratan kritis untuk pendidikan kewarganegaraan dan moral di sekolah-sekolah Kamboja. Ketidakstabilan politik dan rendahnya kualitas guru menjadi tantangan dalam mempertahankan demokrasi yang berkelanjutan. Pemerintah Kamboja seharusnya mampu membuat kebijakan untuk mendorong pendidikan kewarganegaraan dan moral yang efektif dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi (Kheang, 2011). Mewujudkan iklim kondusif bagi tumbuhnya demokrasi yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama khususnya di dunia pendidikan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini membahas terkait (1) penerapan komprehensif program pendidikan kewarganegaraan dan moral, serta (2) dampak program pendidikan kewarganegaraan dan moral dalam mempromosikan demokrasi yang berkelanjutan.

METODE

Kajian ini menggunakan metodologi fenomenologi kualitatif untuk mengeksplorasi cara-cara peserta didik menginternalisasi, menafsirkan, serta menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam konteks komunitas dan lingkungan pendidikan. Fenomenologi didedikasikan untuk mengungkap esensi dari pengalaman hidup individu terkait fenomena atau konsep tertentu (Neubauer et al., 2019). Subjek dalam kajian ini difokuskan pada pendidik dan peserta didik sekolah menengah atas serta kaum muda berusia 20 hingga 25 tahun. Peserta didik sekitar 20 orang akan dipilih secara strategis melalui pengambilan sampel purposif dari lembaga pendidikan yang terletak di lanskap perkotaan Phnom Penh dan wilayah kaya akan budaya di Provinsi Siem Reap. Strategi pemilihan sampel dirancang untuk mengumpulkan berbagai perspektif dari latar belakang sosial-budaya serta pendidikan, sehingga memperkaya pemahaman tentang lanskap pendidikan kewarganegaraan dan moral dalam konteks Kamboja.

Sumber data primer dalam kajian ini diperoleh melalui wawancara, sedangkan sumber data sekunder berupa kajian literatur terkait kurikulum serta kebijakan sekolah yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan moral. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam one-on-one dengan format semi-struktur melalui pertanyaan terbuka. Data diterjemahkan untuk memastikan akurasi dan dianalisis secara kualitatif. Transkrip wawancara dianalisis secara tematis untuk menentukan topik yang berkaitan dengan dampak program pendidikan kewarganegaraan dan moral. Kurikulum dan kebijakan sekolah dianalisis secara konten menggunakan skema pengkodean terstruktur yang dikembangkan berdasarkan protokol analisis dokumen. Penggunaan metodologi analisis data kualitatif dalam kajian ini dapat mendukung pengembangan pemahaman yang lebih mendalam terkait dampak program pendidikan kewarganegaraan dan moral.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Komprehensif Program Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral

Keterlibatan warga Kamboja dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan dapat dipastikan melalui pendidikan kewarganegaraan dan moral. Revitalisasi pendidikan kewarganegaraan

dan moral sangat penting agar dapat memberikan pengetahuan luas terkait nilai-nilai demokrasi khususnya pada kalangan muda. Penanaman nilai-nilai demokrasi untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian kaum muda di Negara Kamboja membutuhkan langkah-langkah meliputi pelatihan guru, perubahan kurikulum, pembelajaran interaktif, cara kerja politik yang terbuka, dan melibatkan masyarakat. Penerapan komprehensif program pendidikan kewarganegaraan dan moral untuk mempromosikan nilai-nilai dan sikap demokratis dijelaskan sebagai berikut.

Pelatihan Guru dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral

Kegiatan pelatihan harus ditetapkan agar para guru dapat terlatih dengan baik dalam pendidikan kewarganegaraan dan moral. Pengembangan sikap profesional guru dalam mencintai dan bertanggung jawab atas pekerjaannya sangat penting untuk ditumbuhkan terlebih dahulu. Dorongan internal dapat membantu seorang guru untuk bersemangat dan berdedikasi pada pekerjaannya. Kemampuan guru dalam memahami pendidikan moral dan politik sangat penting untuk mengajarkan peserta didik terkait pentingnya menjadi warga negara yang baik (Muñoz, 2014). Pelatihan pedagogis yang menyeluruh memberikan pemahaman secara komprehensif kepada guru mengenai desain kurikulum, kesesuaian tujuan, strategi pembelajaran, dan metodologi penilaian. Menghidupkan kewarganegaraan dan moralitas kepada peserta didik dapat dicapai melalui penggunaan pedagogi berbasis pengalaman seperti pembelajaran proyek, percakapan, bermain peran, dan kesempatan berpartisipasi dalam tugas pelayanan masyarakat. Guru ditugaskan untuk mengembangkan pengalaman belajar yang bermakna untuk mendorong pertumbuhan moralitas dan keterlibatan kewarganegaraan peserta didik.

Tanggung jawab guru untuk menjadi teladan bagi peserta didiknya dengan menunjukkan perilaku moral baik di dalam maupun di luar kelas. Sikap, nilai, dan tindakan yang guru tunjukkan memiliki dampak yang signifikan terhadap para peserta didik. Guru tidak cukup hanya mencontohkan sikap berbudi luhur, tetapi harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip serta nilai-nilai dapat dipercaya, kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan keadilan. Kemampuan untuk berkomunikasi dan bernalar tentang gagasan-gagasan moral

harus dimiliki oleh guru agar dapat mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran (Sutrisno dkk., 2021). Keterlibatan peserta didik dalam pemecahan masalah menunjukkan perlunya berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan prinsip. Partisipasi lokakarya, konferensi, bekerja sama dengan rekan kerja, serta menerima saran dari para profesional harus diikuti guru agar dapat melakukan praktik terbaik dalam pendidikan kewarganegaraan dan moral. Guru membutuhkan dukungan berkelanjutan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan.

Guru tidak dapat mengembangkan kapasitas kewarganegaraan dan moral peserta didik hanya melalui praktik kehidupan nyata, tetapi membutuhkan kesempatan terstruktur untuk merefleksikan serta meningkatkan perilakunya. Upaya untuk memastikan bahwa para guru terlatih dengan baik dalam pendidikan kewarganegaraan dan moral tidak cukup hanya dengan mengharapkan dorongan dari internal. Metode dengan perspektif holistik dibutuhkan untuk mengatasi motivasi guru, keahlian pedagogis, keteladanan, pengembangan profesional, sumber daya, dan materi kurikuler. Peningkatan kemampuan guru bertujuan untuk menumbuhkan individu-individu bermoral agar menjadi warga negara yang baik (Tan, 2008). Rencana multidimensi yang mengintegrasikan semua faktor-faktor kompetensi seorang guru memberikan peluang untuk mencapai potensinya. Pengembangan prosedur pengajaran pendidikan kewarganegaraan dan moral membutuhkan dukungan agar dapat menemukan fondasinya dalam dasar-dasar teori yang kuat.

Perubahan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan moral di Kamboja tidak memadai dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keterlibatan generasi muda. Pembaruan kurikulum berfokus pada mengembangkan pengetahuan dan keterampilan demokratis, nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab sosial, empati, integritas, membangun identitas dan persatuan nasional dengan tetap menghargai keragaman, serta mempersiapkan peserta didik menjadi aktif dan berpartisipasi dalam masyarakat (Tan, 2008; Eng et al., 2021). Proses reformasi kurikulum meliputi analisis kurikulum saat ini, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan

dan keterampilan demokrasi, mengembangkan kurikulum baru berfokus pada demokrasi dan kewarganegaraan, mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan ke dalam semua mata pelajaran, membuat program untuk membangun identitas dan persatuan nasional, melaksanakan proyek kewarganegaraan aktif, melatih guru tentang kurikulum dan metode baru, serta mengevaluasi dan merevisi kurikulum secara berkala. Tema dan topik yang diusulkan dalam kurikulum baru di Kamboja dapat dilihat pada tabel 1

Kurikulum baru yang diusulkan untuk pendidikan kewarganegaraan dan moral di sekolah menengah Kamboja bertujuan mengembangkan nilai-nilai, pengetahuan, kemampuan, serta watak peserta didik agar menjadi warga negara demokratis. Peserta didik diharapkan mampu berkontribusi pada demokrasi yang berkelanjutan di Kamboja. Pembaruan kurikulum bermanfaat bagi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mendalam tentang konsep-konsep inti demokrasi seperti hak asasi manusia, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, serta pemilihan umum yang bebas dan adil (Batubara & Darmawan, 2017). Peserta didik akan belajar tentang struktur pemerintahan dan peran warga negara dalam demokrasi (Hess & Posselt, 2002; Leam et al., 2021). Proyek pelayanan masyarakat, partisipasi kewarganegaraan, dan kegiatan pembelajaran berbasis pengalaman dapat membuat peserta didik mengembangkan keterampilan demokratis (Lim, 2014; Sutrisno dkk., 2021). Reformasi kurikulum akan memberdayakan kaum muda Kamboja untuk berkontribusi pada demokrasi melalui pemungutan suara, keterlibatan politik, dan partisipasi dalam kelompok-kelompok kewarganegaraan.

Menumbuhkan nilai-nilai kewarganegaraan sangat penting untuk memupuk budaya demokratis. Kurikulum baru yang diusulkan menekankan penanaman nilai-nilai kewarganegaraan seperti integritas, tanggung jawab sosial, empati, menghargai keragaman, dan kepedulian terhadap kebaikan bersama (Ruslan, Sanusi, & Safitri, 2021). Peserta didik akan diajarkan untuk membuat keputusan etis dan berpikir kritis. Nilai-nilai kewarganegaraan akan memandu peserta didik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi cita-cita demokrasi serta berkontribusi secara positif bagi masyarakat kamboja. Peserta didik

Tabel 1. Themes and Topics for the New Curriculum

Theme	Percentage	Topic and Learning Outcomes
Democracy and Governance	20%	<ul style="list-style-type: none"> Understanding democratic principles: human rights, rule of law, separation of powers, checks and balances, free and fair elections. Learning about governance structures: roles of legislature, executive, judiciary. Recognizing the role of citizens in voting, political parties, civic groups, protests. Grasping the importance of civic participation for a healthy democracy.
History and Identity	15%	<ul style="list-style-type: none"> Learning about Cambodian history: key events, figures, movements. Understanding Cambodia’s path to democracy. Exploring Cambodian culture, traditions and diversity. Fostering a sense of national identity and unity while respecting diversity.
Social Cohesion and Diversity	15%	<ul style="list-style-type: none"> Respecting differences based on ethnicity, religion, culture, gender, ability. Overcoming prejudice, discrimination and intolerance. Resolving conflict through dialogue and understanding.
Media and Digital Literacy	10%	<ul style="list-style-type: none"> Analyzing information from different media sources. Identifying bias, propaganda and manipulation in media. Using digital tools productively, safely and ethically. Developing online communication and collaboration skills.
Community Engagement and Service Learning	10%	<ul style="list-style-type: none"> Participating in community service projects related to key themes. Developing empathy and care through helping others. Understanding social issues through direct experience. Fostering social responsibility and active citizenship.
21 st Century Skills	10%	<ul style="list-style-type: none"> Collaboration, teamwork and leadership skills. Communication and self-expression. Creativity, imagination and innovation. Critical thinking, problem solving, and decision making.

juga akan mempelajari sejarah, budaya, dan keragaman Negara Kamboja untuk mendapatkan rasa identitas dan persatuan nasional dengan tetap menghormati perbedaan etnis, agama, jenis kelamin, dan kemampuan dalam masyarakat (Kitz, 2015; Hughes & Un, 2011). Pendekatan yang seimbang dapat membantu membangun kohesi sosial yang dibutuhkan untuk kestabilan demokrasi.

Peserta didik yang termotivasi dan berpengetahuan luas sangat penting untuk berfungsinya demokrasi. Program pelayanan masyarakat, partisipasi kewarganegaraan, dan kesempatan belajar berdasarkan pengalaman akan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial serta komitmen untuk berkontribusi secara positif

kepada masyarakat Kamboja (Tan, 2008; Eng et al., 2021). Kurikulum baru menggabungkan pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas sehingga melatih peserta didik untuk secara efektif menavigasi masyarakat modern serta berkontribusi secara produktif dalam sistem demokratis (Meuers, 2013). Pengembangan keterampilan abad 21 sangat penting untuk memotivasi serta memungkinkan peserta didik berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam pembangunan demokrasi Kamboja (Sereyvicheth, 2022; Leam et al., 2021). Kurikulum baru yang telah ditawarkan memiliki potensi untuk menumbuhkan prinsip-prinsip demokrasi pada generasi muda.

Pembelajaran Interaktif dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral

Proses menumbuhkan demokrasi yang berkelanjutan di sekolah-sekolah Kamboja dapat dilakukan melalui pembelajaran interaktif. Tema dalam pembelajaran interaktif meliputi melibatkan siswa, memfasilitasi kegiatan kolaboratif, mendorong pemikiran kritis, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan (Kitz, 2015; Hess & Posselt, 2002). Guru harus mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas-tugas sebagai bagian dari proses pembelajaran interaktif. Peserta didik melalui pembelajaran interaktif mendapatkan dorongan untuk mengembangkan keterampilan dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Program pembelajaran interaktif dalam pendidikan kewarganegaraan dan moral mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang secara aktif berpartisipasi dalam masyarakat demokratis.

Pembelajaran interaktif dapat menggunakan pendekatan proyek dengan menggabungkan pembelajaran akademik dan layanan masyarakat. Hal ini dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk menerapkan materi yang telah dipelajari di kelas dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Peserta didik dapat mengembangkan tanggung jawab sosial dan keterampilan kepemimpinan melalui proyek berbasis layanan masyarakat (Sutrisno dkk., 2021). Pembelajaran berbasis pelayanan sangat efektif dalam mengembangkan kompetensi keterlibatan peserta didik dengan menyediakan konteks otentik untuk belajar mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan solusi kolaboratif. Peserta didik dapat bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyelenggarakan acara seperti terlibat dalam kampanye kebersihan lingkungan serta mempromosikan keterlibatan dan kolaborasi dengan masyarakat. Peserta didik membangun efikasi diri melalui pengalaman sukses memenuhi kebutuhan masyarakat yang otentik.

Proyek layanan masyarakat dalam pembelajaran interaktif dapat mendorong demokrasi yang berkelanjutan di Kamboja. Cara yang dilakukan yaitu peserta didik saat mengerjakan proyek memperoleh kemampuan untuk mengenali masalah, bekerja sama dengan

berbagai pemangku kepentingan, menghasilkan solusi, dan mengamati konsekuensi dari partisipasinya. Peserta didik mendapatkan kemampuan untuk mengontrol hasil interaksi sosial dan keyakinan bahwa partisipasi aktif sangat penting. Hal ini dapat ditunjukkan pada saat peserta didik dan kaum muda dapat membuat perbedaan di dunia saat berkolaborasi dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek-proyek yang signifikan. Peserta didik juga mendapatkan pengalaman terkait struktur demokratis melalui organisasi non-pemerintah lokal, lembaga pemerintah, pemimpin masyarakat, dan individu lainnya. Keterlibatan masyarakat sipil sangat berperan penting dalam upaya perubahan ke arah demokrasi yang berkelanjutan (Kheang, 2011). Peserta didik mengembangkan kesadaran mendalam dalam memperkuat rasa identitas serta tujuan nasional bersama saat berkolaborasi dalam inisiatif publik yang menjangkau berbagai kelompok sosial dan lingkungan.

Pembelajaran interaktif dalam pendidikan kewarganegaraan dan moral pada dasarnya dapat membuat generasi muda berpartisipasi aktif. Hal ini diawali munculnya rasa tanggung jawab terhadap komunitas saat melaksanakan proyek pelayanan di kehidupan masyarakat. Peserta didik setelah mengikuti pembelajaran berbasis pelayanan dapat terlibat secara aktif dalam mempraktekkan prinsip-prinsip demokrasi (Leam et al., 2021). Keterlibatan peserta didik dalam proyek berbasis pelayanan dapat mengembangkan kebiasaan untuk mendukung demokrasi secara berkelanjutan. Proyek berbasis layanan dapat menggunakan beberapa fitur pembelajaran interaktif untuk menanamkan sikap, pengetahuan, dan perilaku kewarganegaraan yang berkelanjutan. Elemen-elemen dalam menerapkan pembelajaran interaktif menjadikan pendidikan kewarganegaraan dan moral memiliki potensi untuk memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan yang berkelanjutan di masyarakat Kamboja. Internalisasi pendekatan interaktif dalam kurikulum kewarganegaraan secara resmi harus diperkuat oleh kolaborasi dengan komunitas lokal.

Cara Kerja Politik yang Terbuka

Negara Kamboja pada awalnya telah mencapai kemajuan menuju administrasi demokratis dan saat ini sedang melalui revolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jaminan

kelangsungan hidup demokrasi yang berkelanjutan bertujuan untuk membekali pemuda dengan keterampilan berpartisipasi. Meningkatkan mutu pendidikan kewarganegaraan dan moral di sekolah diperlukan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, cara kerja politik harus berubah menjadi lebih transparan dan melibatkan seluruh masyarakat terutama generasi muda. Situasi yang menciptakan perubahan politik di Kamboja diawali setelah penandatanganan perjanjian perdamaian dengan Paris pada Tahun 1991 (Hughes & Un, 2011). Pemerintah Kamboja telah menerapkan perubahan substansial untuk mempromosikan nilai-nilai dan lembaga demokratis serta menyelenggarakan beberapa jenis pemilihan yang dilakukan. Sistem demokrasi pada kenyataannya masih menghadapi berbagai permasalahan yaitu korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, serta kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab.

Lembaga pendidikan khususnya pada sekolah menengah harus melakukan investasi dalam pendidikan kewarganegaraan dan moral untuk mendorong pengembangan demokrasi yang berkelanjutan. Pendidikan kewarganegaraan melengkapi individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokratis serta kemampuan memahami hak dan kewajiban (Batubara & Darmawan, 2017). Tujuan pendidikan moral adalah untuk mempromosikan cita-cita etika umum seperti kejujuran dan rasa hormat terhadap orang lain. Peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan dan moral di sekolah menengah bertujuan untuk mereformasi lanskap politik di Kamboja. Revolusi sistem politik dapat meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan dan moral dengan mempromosikan transparansi dan inklusivitas yang lebih besar.

Strategi untuk mengubah lanskap politik di Kamboja yaitu mempromosikan pemilihan demokratis yang ditandai dengan kebebasan dan keadilan. Pemilihan umum yang tidak terbatas dan adil sangat penting untuk mempromosikan pemerintahan demokratis. Masyarakat dilibatkan untuk memastikan para pemimpin bertanggung jawab dalam membuat keputusan yang terinformasi tentang masa depan negara. Partisipasi dalam kehidupan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi.

Warga negara harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokratis dengan cara yang bermakna (Slocomb, 2014). Pemerintah harus mendorong partisipasi pemuda dalam proses pengambilan keputusan serta mendukung kewarganegaraan aktif dan mempromosikan keterlibatan masyarakat. Generasi muda memiliki potensi menjadi warga negara yang aktif jika diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan mempromosikan keterlibatan kewarganegaraan.

Pemerintah harus menerapkan perubahan sistem politik yang meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi. Perubahan sistem politik yang terbuka memberikan pesan konstruktif kepada pemuda dengan menekankan pentingnya suara dalam pemilihan demokratis. Sistem politik yang terbuka juga berdampak positif yaitu penduduk lebih cenderung mempercayai satu sama lain serta menjadikan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran dan keadilan dapat dipromosikan (Muñoz, 2014). Toleransi dan menghormati perbedaan individu menjadi komponen penting dari keberadaan demokrasi yang berkelanjutan. Pemerintah harus mendorong lingkungan yang lebih menghargai dan menghormati keragaman untuk terciptanya harmoni sosial. Kontribusi yang signifikan dapat dilakukan pemerintah untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan dan keadilan melalui promosi toleransi terhadap keragaman.

Revitalisasi proses pengajaran pendidikan kewarganegaraan dan moral di sekolah menengah Kamboja sangat penting untuk memupuk demokrasi yang berkelanjutan. Perubahan pada sistem politik yang lebih transparan dan melibatkan masyarakat luas dapat mendukung tercapainya tujuan dalam meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan moral (UNDP, n.d). Pemerintah memiliki kekuatan untuk berkontribusi mempromosikan demokrasi yang berkelanjutan di Kamboja terkait pemilihan umum bebas dan adil, peningkatan keterlibatan warga negara, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong toleransi dan menghormati perbedaan individu. Pendidikan kewarganegaraan dan moral diharapkan dapat memotivasi masyarakat Kamboja khususnya kaum pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan demokrasi.

Partisipasi Pemuda dalam Demokrasi

Konsep demokrasi adalah prinsip sosial mendasar yang telah diadopsi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Demokrasi dalam konteks Negara Kamboja telah dianggap sebagai komponen penting yang harus dihargai dengan melibatkan generasi muda secara aktif (Hughes & Un, 2011). Warga negara khususnya kaum muda harus mengambil bagian dalam berbagai praktik demokrasi agar dapat berpartisipasi aktif termasuk pemungutan suara, diskusi politik, kampanye, dan proses pemerintahan. Permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah Kamboja yaitu generasi muda tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam praktik demokrasi. Generasi muda terutama yang berusia 18 sampai 30 tahun cenderung tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi (Leam et al., 2021). Rendahnya partisipasi dalam proses demokrasi di kalangan anak muda dapat dikaitkan dengan berbagai permasalahan seperti kurangnya informasi, kepercayaan diri, perasaan apatis, atau keyakinan bahwa suara rakyat tidak diperhitungkan.

Tingkat antusiasme generasi muda di Kamboja untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi masih sangat rendah. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Negara Kamboja untuk berupaya mendemokratisasi pemerintahannya. Generasi muda di Kamboja lebih tertarik untuk terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan media sosial dan internet daripada berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kaum muda Kamboja sejumlah 17,8 persen bersedia berpartisipasi dalam proses demokrasi, sedangkan 69,8 persen menghabiskan lebih banyak waktu di platform media sosial (Sereyvicheth, 2022). Mempromosikan demokrasi yang berkelanjutan melalui media sosial dapat dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi kaum muda terlibat atau menyebarkan konten kewarganegaraan, meningkatnya kesadaran terkait isu-isu kewarganegaraan, mengekspresikan pandangan tentang masalah kewarganegaraan, kelompok kewarganegaraan menggunakan data tersebut untuk menargetkan konten kepada pengguna muda, dan media sosial merekomendasikan konten kewarganegaraan (Heng, 2016). Penyelidikan berbagai pendekatan sangat penting untuk mendorong generasi muda berpartisipasi dalam proses demokrasi baik melalui pendidikan, pengawasan, media, dan suasana politik.

Dampak Program Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral dalam Mempromosikan Demokrasi yang Berkelanjutan

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan moral yang lebih baik di sekolah menengah Kamboja dapat membantu dalam menumbuhkan demokrasi jangka panjang dan meningkatkan keterlibatan generasi muda. Pengajaran kewarganegaraan dan moral harus dilaksanakan dengan lebih interaktif dan berpusat kepada peserta didik (Tan, 2008). Kurangnya keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan disebabkan guru masih menggunakan pendekatan berbasis ceramah di sekolah menengah Kamboja. Pendekatan konvensional dalam proses pembelajaran tidak dapat mengembangkan keterampilan analitis kritis yang diperlukan untuk keterlibatan demokratis secara bermakna. Peserta didik di sekolah menengah Kamboja memiliki keinginan secara signifikan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada debat dan partisipasi. Guru seharusnya mengaitkan prinsip-prinsip kewarganegaraan dengan situasi dunia nyata. Motivasi peserta didik untuk memiliki kapasitas kewarganegaraan dapat dikembangkan melalui reorientasi pembelajaran berbasis proyek dan pelayanan.

Negara Kamboja pada dasarnya mengharuskan peserta didik untuk menerima pendidikan moral, akan tetapi kurikulum sering kali gagal memberikan hubungan yang berarti dengan mata pelajaran kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi. Pengintegrasian nilai-nilai moral dalam pendidikan sangat penting dilakukan khususnya dalam mempromosikan demokrasi yang berkelanjutan. Peserta didik dapat terlibat dalam refleksi kritis tentang etika dan kewarganegaraan jika diberikan kesempatan untuk menghubungkan keduanya dengan mengeksplorasi masalah moral yang relevan dengan politik dan pemerintahan (Kitz, 2015). Peserta didik memiliki kompas moral yang kuat, tetapi mengalami kesulitan untuk mendamaikan korupsi di Kamboja dengan norma-norma etika. Pengajaran kewarganegaraan dan nilai-nilai yang terintegrasi dapat mengatasi kekosongan penting dalam sistem pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan dan moral diperlukan untuk memajukan dan mempertahankan demokrasi di Kamboja.

Pendidikan kewarganegaraan di Kamboja sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik berpartisipasi dalam praktik demokrasi. Peserta didik harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupannya (Lim, 2014). Permasalahan yang dapat muncul pada kalangan peserta didik yaitu perasaan tidak berdaya tentang politik. Peningkatan jumlah komite sekolah, klub, inisiatif layanan masyarakat, dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya dalam kebijakan sekolah memberikan dampak besar pada perasaan agensi politik dan sosial peserta didik. Merestrukturisasi pengajaran kewarganegaraan yang difokuskan pada keterlibatan aktif, penanaman etika, serta memprioritaskan pendapat dan tindakan kaum muda. Pendidikan kewarganegaraan dan moral dapat mendorong pengembangan generasi muda di Kamboja yang demokratis dengan terlibat secara aktif dalam masyarakat.

Demokrasi yang berkelanjutan dapat dipertahankan jika kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan moral diimplementasikan dengan baik. Rekomendasi utama yang diberikan dalam mempromosikan demokrasi berkelanjutan meliputi pendidik harus menerima pelatihan untuk menggunakan metodologi pengajaran yang melibatkan peserta didik dalam penerapan praktis prinsip-prinsip kewarganegaraan, institusi pendidikan harus menawarkan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab atas inisiatif melakukan pengabdian masyarakat, serta Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Moral harus digabungkan untuk mengatasi tantangan etika dalam pemerintahan dengan menggunakan studi kasus, literatur, dan filosofis. Institusi pendidikan juga harus menyediakan saluran yang memungkinkan peserta didik untuk secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Muñoz, 2014). Sumber daya guru harus dikembangkan meliputi konten, pedagogi, dan bahan ajar untuk kerangka kerja kewarganegaraan dan moral yang terintegrasi. Pelatihan guru dan pengembangan kurikulum lebih lanjut diperlukan untuk memfasilitasi perubahan dalam pendidikan kewarganegaraan dan moral di Kamboja.

SIMPULAN

Program pendidikan kewarganegaraan dan moral khususnya di sekolah menengah diperlukan

untuk memajukan dan mempertahankan demokrasi yang berkelanjutan di Kamboja. Penanaman nilai-nilai demokrasi untuk meningkatkan partisipasi dan kepedulian kaum muda di Negara Kamboja membutuhkan langkah-langkah meliputi pelatihan guru, perubahan kurikulum, pembelajaran interaktif, cara kerja politik yang terbuka, dan melibatkan masyarakat. Komitmen dari generasi muda dengan dibekali pengetahuan kewarganegaraan dan moral diperlukan untuk memperkuat demokrasi. Lembaga pendidikan dapat membantu mempromosikan demokrasi yang berkelanjutan melalui penemuan kembali pendidikan kewarganegaraan untuk memberdayakan keterlibatan generasi muda. Penerapan metodologi pembelajaran interaktif, penanaman etika, serta pemerintahan partisipatif dalam pendidikan kewarganegaraan dan moral berpotensi mendorong pengembangan demokrasi yang berkelanjutan. Pengajaran pendidikan kewarganegaraan dan moral yang lebih baik di sekolah menengah Kamboja dapat membantu dalam menumbuhkan demokrasi jangka panjang dan meningkatkan keterlibatan generasi muda.

DAFTAR RUJUKAN

- Batubara, A., & Darmawan, C. (2017). Revitalisasi Paradigma Konservatif Pendidikan Demokrasi pada Pendidikan Kewarganegaraan dengan Inovasi Media Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 81-84.
- Eng, S., Morgenbesser, L., & Sok, S. (2021). The Political Economy of Competitive Electoral Authoritarianism in Cambodia. *Democratization*, 28(5), 982-1000.
- Heng, S. (2016). Social Media and Nation Building in Cambodia. *Asiascape: Digital Asia*, 3(1), 78-111.
- Hess, D., & Posselt, J. (2002). How High School Students Experience and Learn from The Discussion of Controversial Public Issues. *Journal of Curriculum and Supervision*, 17(4), 283-314.
- Hughes, C., & Un, K. (2011). *Cambodia's Economic Transformation: Historical and Theoretical Frameworks*. London: Routledge.
- Kheang, S. (2011). Youth, Politics and Citizenship in Cambodia. *Journal of Youth Studies*, 14(8), 981-995.

- Kitz, L. (2015). *Cambodian Youth in the Democratic Process: Civic Knowledge, Attitudes, and Engagement*. Washington: National Democratic Institute.
- Lim, S. H. (2014). *Youth Essential to Future Sustainable Development in Cambodia*. Diakses dari <https://asiafoundation.org/>.
- Leam, S. K., Wan, Y. M., & Hwa, A. K. (2021). Youth Behaviors and Awareness of Cambodian Youth on Democracy. *SHS Web of Conferences*, 9(4), 1-5.
- Meuers, A. (2013). *What is Service-Learning?*. Diakses dari <https://nylc.org/what-is-service-learning/>.
- Muñoz, A. (2014). Educated but Disempowered: Highly Educated Youth and Politics in Cambodia. *Journal of Southeast Asian Affairs*, 1(2), 69-88.
- Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How Phenomenology Can Help Us Learn from The Experiences of Others. *Perspective on Medical Education*, 8(2), 90-97.
- Ruslan, Sanusi, & Safitri, W. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Dasar Perdamaian dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 530-537.
- Sereyvicheth, C. (2022). *Cambodian Youth Policy Survey*. Diakses dari <https://www.ticambodia.org/>.
- Slocomb, M. (2014). The Civic Deficit in Cambodia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 143-150.
- Sutrisno, Sapriya, Komalasari, K., & Rahmad. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Proyek Warga Global dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 155-164.
- Tan, C. (2008). Two Views of Education: Promoting Civic and Moral Values in Cambodia Schools. *International Journal of Educational Development*, 28(5), 560-570.
- UNDP. (n.d). *Youth, Political Participation and Decision-Making*. Retrieved December 24, 2023, from <http://www.undp.org/governance>.